



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020



Sehubungan telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, semua kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis 5 (lima) periode 2020-2024 yang mengacu pada perpres tersebut.

Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 disusun mengacu pada beberapa dokumen perencanaan nasional, diantaranya PP nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Presiden yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tanpa mengubah visi dan misi Kementerian Perindustrian 2020-2024.

Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 diharapkan akan mampu meningkatkan sinergitas perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan pada masing-masing indikator kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Kemenperin 2020-2024. Diharapkan renstra ini dapat menjadi acuan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk dapat bersinergi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan industri yang tepat sasaran.

Jakarta, 8 Mei 2020
Menteri Perindustrian

ttd

Agus Gumiwang Kartasasmita



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenperin 2020-2024.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA, 



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
 - 2. Aspirasi Masyarakat
- B. Potensi dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan.
- D. Sasaran Strategis
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)
 - 2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)
 - 3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
 - 4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
 - 1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
 - 2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 - 3. Kebijakan Pemberdayaan Industri

4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
 5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
 6. Kebijakan Reformasi Birokrasi
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja:
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 2. Indikator Kinerja Program
 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

TABEL 1 MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN
2020-2024

TABEL 2 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Kondisi Umum

Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Industri
Aspirasi Masyarakat

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi
Permasalahan

**BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
STRATEGIS**

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

Perspektif Pemangku Kepentingan
(*Stakeholders Perspective*)

Perspektif Pelanggan (*Customer
Perspective*)

Perspektif Proses Internal (*Internal
Process Perspective*)

Perspektif Pembelajaran Organisasi
(*Learning and Growth Perspective*)

1

2

15

17

18

18

19

19

**BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN**

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

**B. Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian Perindustrian**

Kebijakan Pengembangan Sumber
Daya Industri

Kebijakan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Industri

Kebijakan Pemberdayaan Industri

Kebijakan Pengembangan
Perwilayahan Industri

Kebijakan Fasilitas Fiskal dan
Nonfiskal

Kebijakan Reformasi Birokrasi

C. Kerangka Regulasi

D. Kerangka Kelembagaan

25

26

30

40

41



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

45

A. Target Kinerja

46

- Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
- Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
- Kebijakan Pemberdayaan Industri
- Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
- Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
- Kebijakan Reformasi Birokrasi

B. Kerangka Pendanaan

48

BAB V
PENUTUP

49

LAMPIRAN

51

Bagan 1 Pohon Kinerja Renstra
Kemenperin 2020-2024

Tabel 1 Matrik Kinerja Dan Anggaran
Renstra Kemenperin 2020-2024

Tabel 2 Pedoman Kinerja Renstra
Kemenperin 2020-2024

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB I

PENDAHULUAN



A Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1 Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2 Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3 Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4 Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6 Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan

secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi,



serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua

1

Penguatan Struktur Industri Dilaksanakan Melalui:

- Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
- Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- Mendesain ulang zona industri nasional; dan
- Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.

kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

2

Penguasaan Teknologi

- Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
- Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
- Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- Pengembangan Industri Hijau.

3

Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum;
 - b. Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi;
 - c. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional;
 - e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan;
 - f. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi dan Handal;
 - g. Peningkatan Kualitas Kehumasan;
 - h. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - i. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.
 - j. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
 - b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
 - c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu;
 - d. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
 - e. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
 - f. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - g. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
 - h. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
 - i. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro.
 - j. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;
 - k. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
 - l. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - m. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
 - n. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam.
 - o. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur;
 - p. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka;
 - q. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;
 - r. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
 - s. Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
 - t. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional;



- t. Pengembangan Akses Industri Internasional;
 - u. Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri, serta Pengembangan Akses Industri Internasional; dan
 - v. Pengembangan Wilayah Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau;
 - c. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri;
 - d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar;
 - e. Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
 - g. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - h. Sertifikasi Industri.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Industri;
 - c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem;
 - d. Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem; dan
 - e. Peningkatan Kompetensi ASN.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin periode 2015-2019 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin tahun 2015-2019. Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:

Kondisi Perekonomian Global pada Tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 merupakan laju pertumbuhan tahunan terendah dalam empat tahun terakhir. Bila dilihat tren perkembangan sejak 2014, laju pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah yang terendah kedua setelah tahun 2015 dalam lima

tahun terakhir. Apabila dilihat perkembangannya berdasarkan data triwulanan kumulatif (c-to-c), pada triwulan I tahun 2019 sempat tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama

dalam lima tahun terakhir tetapi pada triwulan selanjutnya cenderung turun terus sampai akhir tahun 2019. Secara lengkap dapat di lihat pada **tabel 1.1**.

Tabel 1.1
Perkembangan Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan 2015-2019 (%)

Tahun	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
2015	4.83	4.78	4.78	4.88	4.88
2016	4.94	5.08	5.06	5.03	5.03
2017	5.01	5.01	5.03	5.07	5.07
2018	5.06	5.17	5.17	5.17	5.17
2019	5.07	5.06	5.04	5.02	5.02

Sumber: BPS

Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN (lihat Tabel 1.2) mengalami pertumbuhan yang lebih stabil. Sedangkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang naik-turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0%

dan pada tahun 2015-2018 masih stabil meningkat hingga level 5,2%, sedangkan Malaysia pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang naik-turun, sempat tumbuh sebesar 5,7% namun pada tahun 2019 turun menjadi 4,5% serta Singapura pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan pada tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 0,5%.

Tabel 1.2
Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara ASEAN

No	Negara	PDB (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Indonesia	4,9	5,0	5,1	5,2	5,0
2	Singapura	2,9	3,0	3,7	3,1	0,5
3	Malaysia	5,0	4,4	5,7	4,7	4,5
4	Thailand	3,1	3,4	4,0	4,1	2,9
5	Vietnam	6,7	6,2	6,8	7,1	6,5
6	Filipina	6,1	6,9	6,7	6,2	5,7

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020

Pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2019 mayoritas cenderung melemah bila dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2019 Indonesia hanya kalah dengan Cina dengan pertumbuhan

pada tahun 2019 sebesar 6,1%, bila dilihat dari percepatan pertumbuhan hanya Jepang yang mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan 6 negara lainnya mengalami perlambatan.

Tabel 1.3
Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara Lain

No	Negara	GDP (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	USA	2,9	1,6	2,4	2,9	2,4
2	Rusia	-2,3	0,3	1,6	2,3	1,1
3	Cina	6,9	6,7	6,8	6,6	6,1
4	Jepang	1,2	0,6	1,9	0,8	0,9
5	Inggris	2,3	1,8	1,8	1,4	1,2
6	Perancis	1,1	1,1	2,3	1,7	1,2
7	Australia	2,5	2,8	2,4	2,7	1,7

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015-2019 sesuai Produk Domestik

Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 selalu tumbuh. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07%. Data selengkapnya tersaji pada **tabel 1.4**.

Tabel 1.4
Pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2015 – 2019 (Y to Y) tahun dasar 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	3,37	3,92	3,89	3,64
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22
3	Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80
	a. Industri Migas	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,10
	b. Industri Nonmigas	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83
6	Konstruksi	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,54	4,03	4,46	4,97	4,62
8	Transportasi dan Pergudangan	6,71	7,45	8,49	7,06	6,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	5,17	5,41	5,68	5,80
10	Informasi dan Komunikasi	9,70	8,88	9,63	7,02	9,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,93	5,47	4,17	6,60
12	Real Estate	4,11	4,69	3,60	3,48	5,74
13	Jasa Perusahaan	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	3,20	2,05	7,00	4,67
15	Jasa Pendidikan	7,33	3,84	3,72	5,35	6,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,69	5,16	6,84	7,15	8,68
17	Jasa lainnya	8,08	8,01	8,73	8,97	10,55
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 menunjukkan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari 17 sektor yang ada, pertumbuhan terjadi di semua sektor kecuali sektor industri migas yang mengalami penurunan sebesar 1,1%. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 10,55%; jasa perusahaan sebesar 10,25%; dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%.

Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas Tahun 2019 masih menunjukkan trend perlambatan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun lalu yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02%.

Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2018. Terdapat 7 cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; industri mesin dan perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; industri angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; industri barang galian bukan logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99%.



Tabel 1.5

Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas 2015 – 2019 menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
Industri Pengolahan Nonmigas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

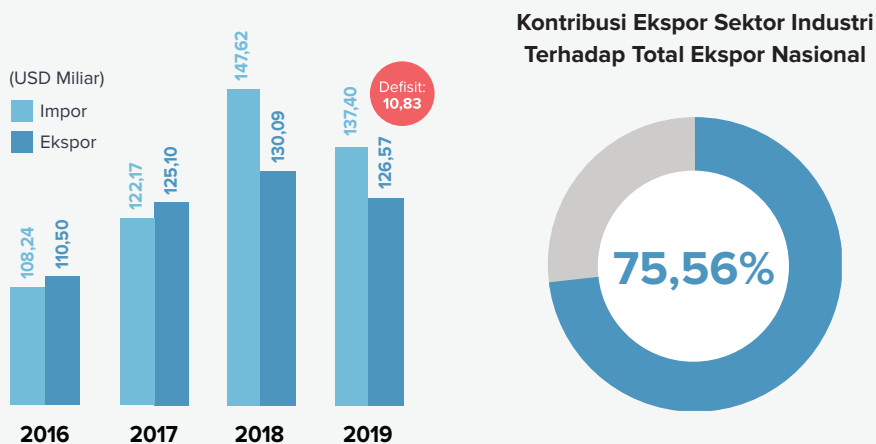
Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%.



Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas pada Tahun 2015-2019

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar.

Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.



5 Sektor Industri Terbesar



Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.1
Perdagangan Sektor Industri Tahun 2016 - 2019

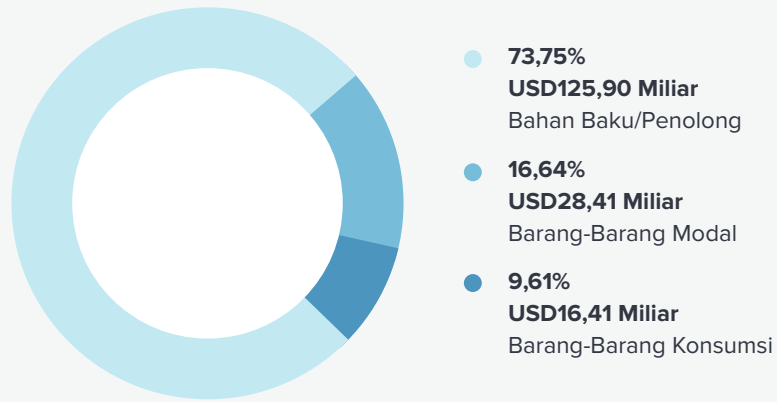
Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,56% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,50 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, bila dilihat berdasarkan tahun 2016 – 2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74 miliar. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana Amerika

Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Cina sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih di tempati oleh Cina sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.

Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau sebesar 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau sebesar 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada **gambar 1.2**.





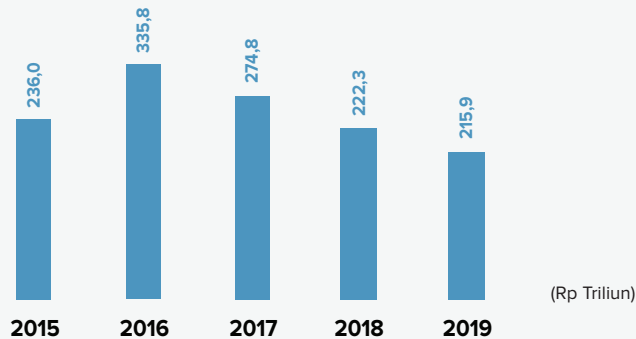
Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.2
Impor Indonesia menurut Penggunaan Barang Tahun 2019

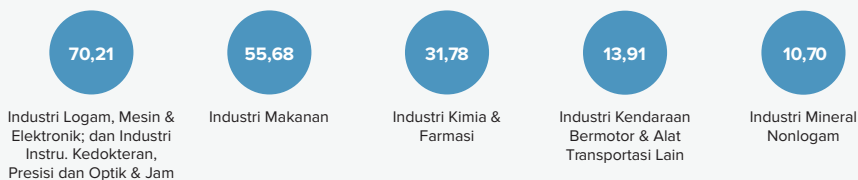
Perkembangan Investasi Indonesia pada Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya kondisi perang dagang

antara Amerika dengan Cina menyebabkan shock sentiment investasi. Investasi terbesar sektor industri di sumbang oleh industri logam, mesin & elektronik dan industri instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam sebesar Rp. 70,21 triliun dan ditempat kedua terbesar industri makanan sebesar Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada **gambar 1.3**.



5 Sektor Industri Terbesar



Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.3
Investasi Sektor Industri Tahun 2019

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain: harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang dirasa masih kurang kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu

penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform *Online Single Submission* (OSS).

Capaian Kinerja Sasaran sesuai Dokumen Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Terbagi ke Dalam Beberapa Bagian

a. Capaian Peta Strategi Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019

Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.

b. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 dengan 72 target indikator kinerja, capaian akhir sebanyak 44 (61,11%) target indikator kinerja sasaran dapat tercapai dan 28 (38,89%) target indikator kinerja sasaran tidak dapat tercapai.

c. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan 57 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 16 (28,07%) target tercapai dan 41 (71,93%) target belum tercapai.

d. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan 80 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 32 (40%) target tercapai dan 48 (60%) target belum tercapai.

e. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 dengan 74 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 29 (39,19%) target tercapai dan 46 (35%) target tidak tercapai.

f. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dengan 38 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 11 (28,95%) target dapat tercapai dan 27 (71,05%) tidak tercapai.

g. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan 40 target



indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 23 (57,5%) target dapat tercapai dan 17 (42,5%) target tidak tercapai.

h. Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2015-2019

Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan 95 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 35 (36,84%) target dapat tercapai dan 60 (63,16%) target tidak tercapai.

i. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan 150 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 99 (66%) target dapat tercapai dan 51 (34%) target tidak tercapai.

j. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dengan 32 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 28 (87,5%) target dapat tercapai dan 4 (12,5%) target tidak tercapai.

k. Capaian Rencana Aksi 10 Industri Prioritas tahun 2015-2019

Selama 2015-2019 terdapat 191 rencana aksi yang harus ditindaklanjuti dimana sebanyak 121 (63%) rencana aksi yang telah dilaksanakan serta 70 (37%)

rencana aksi yang belum dilaksanakan. Pada 10 industri prioritas tersebut masih terdapat 2 industri yang belum dilaksanakan sama sekali, yaitu 7 rencana aksi pada industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan 5 rencana aksi pada industri komponen dan bahan penolong.

l. Capaian kinerja Kerangka Regulasi tahun 2015-2019

Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25 (37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.

m. Capaian anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019

Total rencana anggaran periode 2015-2019 pada Renstra Kementerian Perindustrian adalah Rp 26.822.120 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp. 15.787.619 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada gap atau selisih sebesar Rp 11.034.501 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.

Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:

Terkait Tantangan Lingkungan

Tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah perubahan yang begitu cepat, tidak pasti, rumit dan menyebabkan keraguan atau biasa disebut kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta meningkatnya globalisasi akibat krisis yang terjadi. Akibatnya Kementerian diharapkan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan.

Terkait Data dan Informasi

Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data industri dan kawasan industri yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Terkait Kapasitas Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap *outcome/impact* dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program bukan hanya rutinitas, tanpa perbaikan, inovasi dan terobosan.

Terkait Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik

Prinsip 3E merupakan Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati (input), Efisien berarti menggunakan sumber daya dengan tepat guna (Proses) dan Efektivitas (*Output/Outcome*) berarti tepat sasaran. Implementasi prinsip ini pada seluruh aspek, fungsi dan sistem sangat penting agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



B Potensi dan Permasalahan

Potensi

Potensi Alam Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional.

Dinamika sektor industri

Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.

Kebijakan Otonomi Daerah

Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

Pangsa Pasar Dalam Negeri

Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas, dan nitrogen);
- Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolahan limbah);
- Kurangnya tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- Tekanan produk impor;
- Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan
- Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat).

halaman ini sengaja dikosongkan





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS



A Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

B Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong

bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

C Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

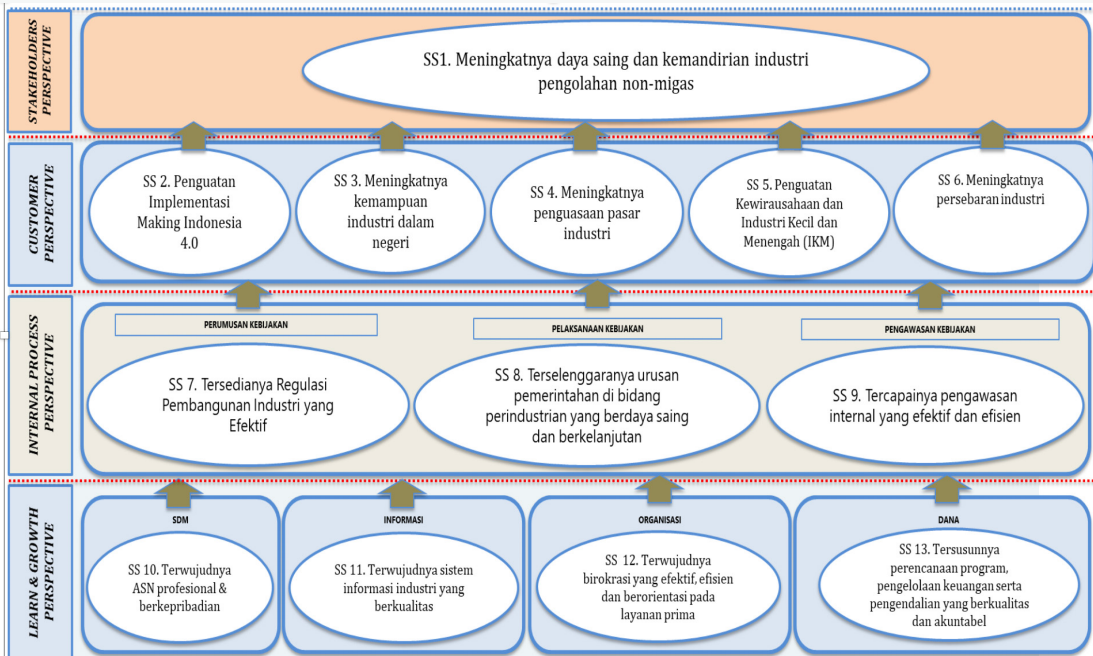
	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	133,1	181,6

D Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process*

perspective, dan *learning and growth perspective*.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada **gambar 2.1**.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Perindustrian

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
- Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
- Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
- Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
- Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar

15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.

- Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
- Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

- Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)* ≥ 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
- Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020

ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.

- c. Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.
- d. Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
- b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
- c. Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.
- d. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
- b. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
- c. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.

- d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:

- a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
- b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
- c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
- d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
- b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
- c. Fasilitas KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
- d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
- e. Sentra industri kecil dan menengah

(SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja: efektifitas kebijakan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- a. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
- b. Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:

- a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
- c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output*, *outcome*, maupun *impact* dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
- b. ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:

- a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
- b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
- b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.



Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program

dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.

- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.



halaman ini sengaja dikosongkan





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN



A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.



Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

AGENDA 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Arah Kebijakan:

a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan
- 5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
- 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6) mengembangkan industri halal.

c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- 3) mengelola impor;
- 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
- 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- 6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan
- 7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.



d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
- 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
- 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
- 5) reformasi fiskal; dan
- 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

AGENDA 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

- 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
- 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
- 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari



industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;

- 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
- 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja.

b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:

- 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
- 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
- 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
- 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
- 5) pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
- 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan
- 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.



B Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;

3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;
3. industri otomotif;
4. industri kimia; dan
5. industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1	Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2	Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3	Kebijakan pemberdayaan industri
4	Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5	Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6	Kebijakan reformasi birokrasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:



1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten.
- b. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) Penguatan implementasi *making indonesia 4.0*; dan
 - 3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:

- a. Pembangunan sumber daya manusia industri.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 program pengembangan vokasi industri yakni:

 - 1) Pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju *dual system*;
 - 2) Pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan industri dan revitalisasi politeknik;
 - 3) Pengembangan smk berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri;
 - 4) Pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
 - 5) Pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri; dan
 - 6) Pengembangan SDM menuju *making indonesia 4.0*.

Kompetensi SDM industri juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dalam rangka menghadapi tantangan era *Making Indonesia 4.0*. Dalam rangka pembangunan kompetensi *Making Indonesia 4.0* dilakukan program – program sebagai berikut:

- 1) Pengembangan *online learning*;
 - 2) Redesain kurikulum dan pengembangan program studi mengacu *making indonesia 4.0*;
 - 3) Pengembangan riset *making indonesia 4.0* Pada politeknik;
 - 4) Program *s2 double degree* dengan konsentrasi *making indonesia 4.0*;
 - 5) Pelatihan SDM bidang industri 4.0;
 - 6) Pengembangan politeknik mendukung *making indonesia 4.0*; dan
 - 7) Pusat inovasi & lembaga riset industri 4.0.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam.

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:

 - 1) Perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 5 (lima) sektor prioritas dalam *making indonesia 4.0* yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar di impor;



- 2) Pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan
- 3) Pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di KI.

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

- 1) Penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;
- 2) Meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor;
- 3) Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional;
- 4) Mempercepat proses negosiasi dan review *free trade agreement* (FTA);
- 5) Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir;
- 6) Meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan
- 7) Memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- 1) Pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi *making indonesia 4.0* Dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat *time-to-market*, *mass-customization*, serta menghasilkan *smart products*;
- 2) Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi industri;
- 3) Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
- 4) Implementasi hasil litbangyasa industri untuk ikm dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan standarisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan original equipment manufacturing (oem), serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- 5) Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan *research and development* (R&D);



- 6) Riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
 - 7) Komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:
- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, inkubator bisnis dan pusat pelatihan;
 - 2) Pengembangan sentra industri kreatif;
 - 3) Pelatihan, bimbingan, atau konsultansi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi;
 - 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; dan
 - 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam dan luar negeri.
- e. Penyediaan sumber pembiayaan.
- Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:
- 1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan *buyers credit*;
 - 2) Pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing;
 - 3) Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor;
 - 4) Kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui berupa kredit usaha bagi IKM;
 - 5) Dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; dan
 - 6) Kredit usaha melalui *financial technology (Fintech)* yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM.

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:



- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
 - 2) Meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
- c. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diterjemahkan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

- a. Pengembangan standardisasi industri.
Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan standardisasi industri;
 - 2) Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
 - 3) Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (IPK);
 - 4) Peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
 - 5) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.
- b. Pengembangan infrastruktur industri.
Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang *clean and clear*, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:
 - 1) Penyediaan lahan industri yang siap digunakan;
 - 2) Pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air baku;
 - 3) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;
 - 4) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air baku yang mendukung industri;
 - 5) Pengembangan sumber energi yang terbarukan;
 - 6) Diversifikasi dan konservasi energi;
 - 7) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi;
 - 8) Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;
 - 9) Penyediaan moda transportasi yang efisien; dan
 - 10) Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.



c. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Penyelenggaraan SIINAS meliputi:

- 1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- 2) Pengelolaan sistem informasi;
- 3) Pengadaan data dan penyediaan informasi;
- 4) Penyebarluasan data dan informasi; dan
- 5) Pembinaan dan pengawasan sistem informasi. Implementasi siinas tahun 2020-2024 akan difokuskan pada beberapa aktivitas utama yaitu:
 - a) Pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, pengadaan data peluang dan perkembangan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
 - b) Pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta layanan publik kementerian perindustrian ke dalam siinas;
 - c) Publikasi informasi industri;
 - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.

3. Kebijakan Pemberdayaan industri.

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
 - 3) Meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
 - 4) Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (ikm).
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri.
- c. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah.

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka menghadapi era *Making Indonesia 4.0* difokuskan pada dua aspek utama:

 - 1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e-business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultasi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi IKM (aspek internal).



- 2) Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).
- b. Pengembangan industri hijau.
- Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
- 1) Pengembangan standar industri hijau;
 - 2) Penguatan infrastruktur industri hijau;
 - 3) Fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
 - 4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
 - 5) Peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - 6) Promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.
- c. Pengembangan industri strategis.
- Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
- e. Kerjasama internasional di bidang industri.
- Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri.



Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 telah memiliki *master plan* serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program pengembangan WPPI diarahkan pada:

- 1) Penyusunan pedoman pengembangan WPPI;
- 2) Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan pemerintah daerah;
- 3) Reviu 22 WPPI;
- 4) Redesain zona industri berbasis WPPI;
- 5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan
- 6) Kerjasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.

b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI diarahkan pada:

- 1) Koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;
- 2) Reviu Pengembangan KPI;
- 3) Penjaminan pemanfaatan KPI; dan
- 4) Pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI.

c. Kawasan Industri (KI).

Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan maupun jaringan) dan tenant. Kendala yang dihadapi oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan antara lain: KI Halal, KI khusus IKM, serta KI Hortikultura.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;
- 2) Penataan KI;
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar KI; dan
- 4) Pembangunan KI tematik.

d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra IKM difokuskan pada:



- 1) Penyusunan pola pengembangan sentra IKM;
- 2) Pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan *captive market* terhadap produk-produk sentra; dan
- 3) Penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri; dan
- c. Meningkatkan penguasaan pasar industri.

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan utama, yaitu:

- a. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, penyiapan SDM Industri yang kompeten);
- b. Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru; dan
- c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;
- b. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian; dan
- c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024 merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas



- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.

Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- h. Penguatan Pengawasan.



Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni:
 - RUU tentang Bahan Kimia.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni:
 - a. RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
 - b. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
 - c. RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
 - d. RPP tentang Industri Maritim;
 - e. Revisi PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; dan
 - f. RPP tentang Perwilayahan Industri.
3. Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres), yakni:
 - a. Rperpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
 - b. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024; dan
 - c. Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional.

Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian

Tahun 2020-2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Kementerian Perindustrian mentargetkan untuk dapat menyusun 1 (satu) undang-undang, 6 (enam) peraturan pemerintah, dan 3 (tiga) peraturan presiden, sehingga total terdapat 10 produk hukum yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020-2024. Jangka waktu penyelesaiannya beragam, yaitu: 4 (empat) peraturan pada tahun 2020, 2 (dua) peraturan pada tahun 2021, 2 (dua) peraturan pada tahun 2022, 1 (satu) peraturan pada tahun 2023, dan 1 (satu) peraturan pada tahun 2024. Secara lebih jelas dapat di lihat pada **tabel 3.1.**



Tabel 3.1
Matrik Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia	Sinergi Kebijakan antar K/L terkait peredaran bahan kimia di dalam negeri	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2024
2	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Mengatur Izin Produksi, Penyimpanan, Transportasi, penanganan, ekspor impor bahan kimia daftar	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2020
3	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99	Ditjen KPAIL	Dit. KIUI	2021
4	RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Setjen	Biro Perencanaan	2020
5	RPP tentang Industri Maritim	Amanat Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen ILMATE	Direktorat IMATAP	2022
6	RPP tentang Revisi PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Amanat PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ditjen KPAIL	Dit. PI	2021
7	RPP tentang Perwilayahan Industri	Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat 4	Ditjen KPAIL	Dit. PI	2022
8	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	BPPI	Pusat Litbang IKFTLMATE	2023
9	RPerpres tentang Kebijakan Nasional Tahun 2020 – 2024	Amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035	Setjen	Biro Perencanaan	2020
10	RPerpres tentang Peta Jalan Implementasi Revolusi Industri Keempat (Making Indonesia 4.0) Tahun 2019-2030	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 Ayat (4)	Setjen	Biro Perencanaan	2020

D Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun

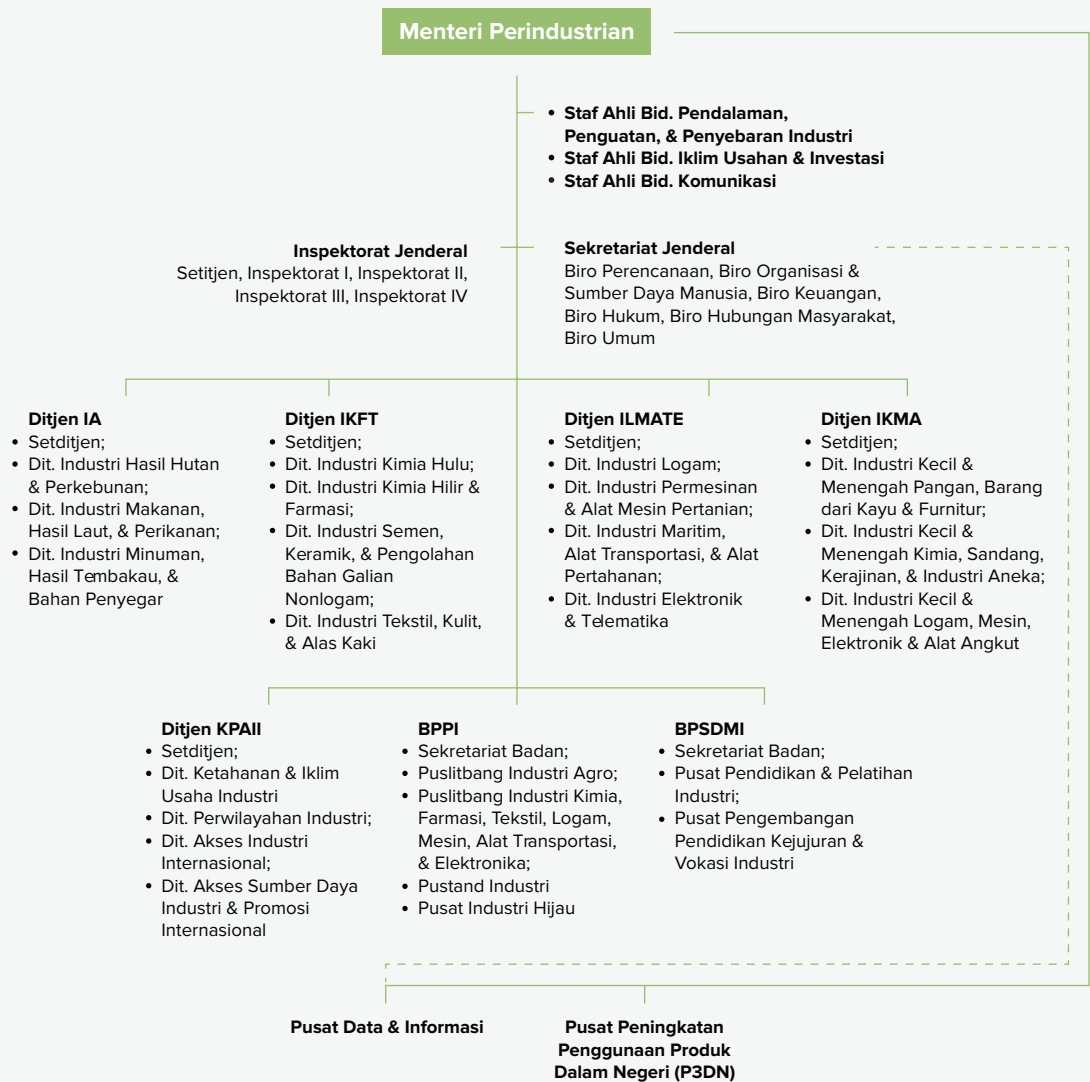
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur eselon I dan tugas dapat di lihat pada **tabel 3.2** dan **gambar 3.1**.

Tabel 3.1

Nomenklatur Unit Kerja Eselon & Tugas di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024

No	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas	Tugas
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaan, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional.
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
8	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10	Staf Ahli Menteri	Memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu kepada Menteri terkait dengan bidang: - Pendalaman, penguatan, dan penyebaran industri; - Iklim usaha dan investasi; dan - Komunikasi.





Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan

kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu.

halaman ini sengaja dikosongkan





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



A Target Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran

strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN								
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional							
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4	
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9	
3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5	
4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6	
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7	
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp. Juta/ orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7	
3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15	
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1	
5	Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30	
6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88	
7	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000 (kumulatif)	
SS2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60	
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70	
3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)	
4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500	
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri							
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0	
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48	
3	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	
4	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri							
1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1	
2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5	
3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80	
4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32	
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)							
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20	
2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20.000 (kumulatif)	
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)	
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5	
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri							
1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)	
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)	
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)	
4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	
5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44	
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80	
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)	
2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	20	20	20	20	20	
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93	
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4	
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	70	71	73	76	80	
2	ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	500	550	600	650	700	
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas							
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	100	100	100	100	100	
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel							
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	96	96,5	97	97,5	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	

Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Kemenperin 2020-2024 telah

ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam bagan 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan. Pedoman kinerja Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 (Rp Miliar)

No.	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	195	570	570	570	570
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	576	2.147	2.157	2.166	2.175
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	568	1.298	1.288	1.279	1.270
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	754	985	985	985	985
TOTAL		2.093	5.000	5.000	5.000	5.000

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja

dan anggaran sebagaimana terdapat pada **tabel 1** di lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.





BAB V

PENUTUP



Rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*;
2. *Customer Perspective*;
3. *Internal Process Perspective*; dan
4. *Learn & Growth Perspective*.

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;

3. Industri otomotif;
4. Industri kimia; dan
5. Industri elektronika.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
6. Kebijakan RB.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.



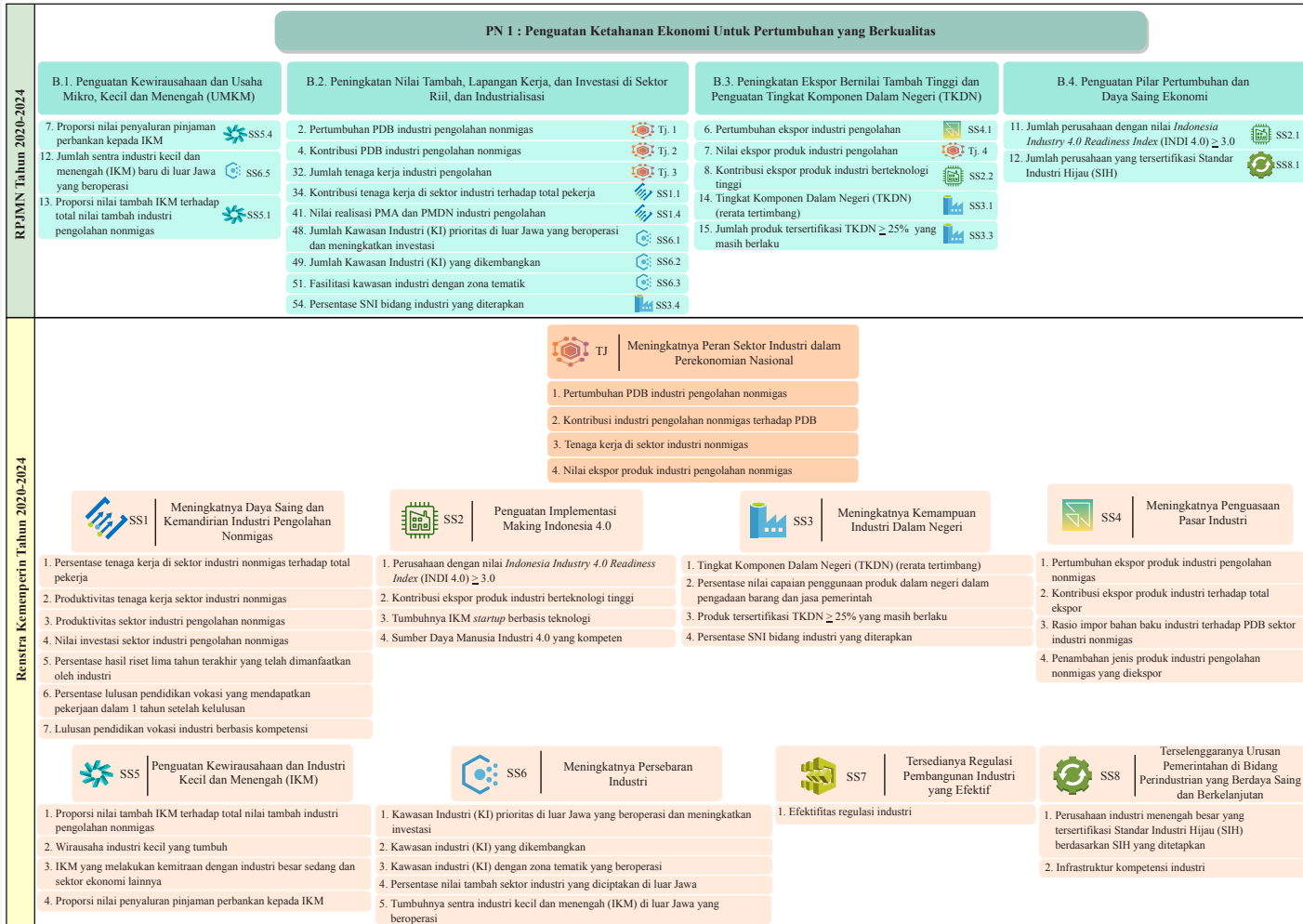


LAMPIRAN



Bagan 1

Pohon Kinerja Renstra Kemenperin 2020-2024



PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

- | | |
|--|-------|
| 3. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | SS1.6 |
| 4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi | SS1.7 |
| 11. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri / badan usaha | SS1.5 |



Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional

1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas
2. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB
3. Tenaga kerja di sektor industri nonmigas
4. Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas



Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas
3. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas
4. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas
5. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
6. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
7. Lulusan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi



Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

1. Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0
2. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi
3. Tumbuhnya IKM *startup* berbasis teknologi
4. Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten



Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)
2. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku
4. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan



Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri

1. Pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan nonmigas
2. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas
4. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor



Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas
2. Wirausaha industri kecil yang tumbuh
3. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
4. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM

SS6

Meningkatnya Persebaran Industri

1. Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi
2. Kawasan industri (KI) yang dikembangkan
3. Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi
4. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa
5. Tumbuhnya sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi



Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

1. Efektifitas regulasi industri



Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

1. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan
2. Infrastruktur kompetensi industri

Tabel 1
Matrik Kinerja dan Anggaran Renstra Kemenperin 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK					Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN							2.093	5.000	5.000	5.000	5.000						
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional																
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas																
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp. Juta/orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15								IA, ILMATE, IKFT dan IKMA		
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1								IA, ILMATE, IKFT dan KPail		
5	Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30								BPPI		
6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88								BPSDMI		
7	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000 (kumulatif)								BPSDMI		
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
1	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60								IA, ILMATE, IKFT dan BPPI		
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70								IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA		
3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)								IKMA		
4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500								BPSDMI		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48	-	-	-	-	-	Setjen
	3	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	-	-	-	-	-	Setjen
	4	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	-	-	-	-	-	BPPI
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32	-	-	-	-	-	KPAII
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20	-	-	-	-	-	IKMA
	2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20.000 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	IKMA
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri													
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	-	-	-	-	-	KPAII

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44	-	-	-	-	-	IKMA
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif												
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Setjen
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan												
1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)	-	-	-	-	-	BPPI
2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	BPSDMI
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	-	-	-	-	-	Itjen
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Itjen
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	Itjen
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Setjen
2	ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	Setjen
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas												
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	Setjen
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Setjen
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	Setjen
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Setjen
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	96	96,5	97	97,5	-	-	-	-	-	Setjen
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Setjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian								195	570	570	570	570		
Tujuan	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif													
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78	79	79	80	-	-	-	-	-	Setjen dan Itjen
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Rocana
	2	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Rokum
SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48	-	-	-	-	-	P3DN
	2	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	-	-	-	-	-	P3DN
SP3	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri													
	1	Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal	Skala (1-4)	2,8	2,81	2,82	2,83	2,85	-	-	-	-	-	Pusdatin
	2	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian	Nilai	80	81	82	83	84	-	-	-	-	-	Rohumas
SP4	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	-	-	-	-	-	Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2	-	-	-	-	-	Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan)	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
SP5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	1	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74	-	-	-	-	-	Set Itjen
	2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum									6,00	22,41	22,41	22,41	22,41	
SK1	Meningkatnya Layanan Legislasi dan Advokasi yang Andal													
	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Rokum
	2	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Rokum
Kegiatan Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi									32,48	54,13	54,13	54,13	54,13	
SK1	Mewujudkan Layanan Administrasi yang Modern, Efisien, dan Akuntabel													
	1	Indeks audit kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	-	-	-	-	-	Romum
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2	3,4	3,5	3,7	4,0	-	-	-	-	-	Romum
Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia									6,00	18,88	18,88	18,88	18,88	
SK1	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi													
	1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kemenperin	Persen	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	RoSDM
	2	Indeks kesesuaian organisasi	Persen	71	72	73	74	75	-	-	-	-	-	RoSDM
	3	Indeks kesesuaian tata laksana	Persen	71	72	73	74	75	-	-	-	-	-	RoSDM
Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional									55,21	68,27	68,27	68,27	68,27	
SK1	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN													
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78	79	79	80	-	-	-	-	-	Rokeu
	2	Nilai kinerja IKPA Kementerian Perindustrian	Nilai	85	86	87	88	89	-	-	-	-	-	Rokeu
	3	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	Rokeu
Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan									12,46	80,04	80,04	80,04	42,03	
SK1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Industri													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	95	95	96	96	-	-	-	-	-	Rocana
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Rocana
Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal									19,71	78,09	78,09	78,09	100,00	
SK1	Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas													
	1	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala (1-4)	3,0	3,10	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	Pusdatin

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Pusdatin
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan								13,45	56,02	56,02	56,02	56,02	
SK1	Meningkatnya Pemberitaan Media Massa dan Interaksi Media Sosial Terhadap Kinerja Industri												
1	Tingkat Interaksi (<i>Engagement Rate</i>) akun media sosial Kemenperin dengan masyarakat	persen	2	2,2	2,4	2,6	3	-	-	-	-	-	Rohumas
2	Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa	persen	5	7	9	10	12	-	-	-	-	-	Rohumas
3	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin	Nilai	80	81	82	83	84	-	-	-	-	-	Rohumas
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								11,60	36,91	36,91	36,91	36,91	
SK1	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48	-	-	-	-	-	P3DN
2	Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Triliun	1,0	1,25	1,5	1,7	2,0	-	-	-	-	-	P3DN
SK2	Meningkatnya Nilai TKDN Produk Industri												
1	Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	-	-	-	-	-	P3DN
2	Jumlah sertifikasi TKDN	Sertifikat	1000	2000	2300	2500	2700	-	-	-	-	-	P3DN
Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja								7,94	75,25	75,25	75,25	91,35	
SK1	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Memadai												
1	Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana	Indeks	3	3,2	3,5	3,8	4	-	-	-	-	-	Romum
2	Efisiensi energi gedung kantor pusat Kementerian Perindustrian	Persen	41	41	41	42	42	-	-	-	-	-	Romum
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I								1,71	8,33	8,33	8,33	8,33	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I												
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	-	-	-	-	-	Ir 1
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	Persen	10	8	6	4	2	-	-	-	-	-	Ir 1

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	lr 1
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	lr 1
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang Baik												
1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	lr 1
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II								1,21	8,33	8,33	8,33	8,33	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II												
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	-	-	-	-	-	lr 2
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	Persen	10	8	6	4	2	-	-	-	-	-	lr 2
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	lr 2
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	lr 2
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik												
1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	lr 2
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III								1,33	8,33	8,33	8,33	8,33	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III												
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	-	-	-	-	-	lr 3
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	Persen	10	8	6	4	2	-	-	-	-	-	lr 3
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	lr 3

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Ir 3
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III yang Baik												
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat III	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	Ir 3
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV								1,06	8,43	8,43	8,43	8,43	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	-	-	-	-	-	Ir 4
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	10	8	6	4	2	-	-	-	-	-	Ir 4
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	Ir 4
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Ir 4
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV yang Baik												
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat IV	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	Ir 4
Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal								24,80	46,60	46,60	46,60	46,60	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian												
	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Ses Itjen
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja yang Baik												
	1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74	-	-	-	-	-	Ses Itjen
	2 Penilaian index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	Ses Itjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK				Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						576	2.147	2.157	2.166	2.175						
TJ	Meningkatnya Peran Industri Nonmigas dalam Perekonomian Nasional															
	1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
SP 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas															
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta / orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
SP 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>															
	1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13,00	13,15	13,30	13,50	13,70	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri															
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
SP 4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri															
	1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5	-	-	-	-	-	ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA		
	4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32	-	-	-	-	-	KPAII		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP 5	Penguatan Kwirusahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20	-	-	-	-	-	IKMA
	2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20.000 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	IKMA
SP 6	Meningkatnya Persebaran Industri													
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	-	-	-	-	-	KPAII
	5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44	-	-	-	-	-	KPAII
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan									7,00	105,96	105,96	105,96	105,96	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	4,86	5,41	6,71	7,74	8,46	-	-	-	-	-	IMATAP
	2	Kontribusi PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB nasional	Persen	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	-	-	-	IMATAP
	3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Ribu Orang	510,22	524,22	541,41	561,80	584,56	-	-	-	-	-	IMATAP
	4	Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	US\$ Miliar	10,69	11,34	12,14	13,10	14,30	-	-	-	-	-	IMATAP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan													
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total pekerja	Persen	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	-	-	-	-	-	IMATAP
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp Juta / orang/tahun	434,87	444,87	458,35	474,58	493,29	-	-	-	-	-	IMATAP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp. Triliun	25,81	32,75	42,40	56,12	75,72	-	-	-	-	-	IMATAP
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Perusahaan	6	7	8	9	10	-	-	-	-	-	IMATAP
2	Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan berteknologi tinggi	Persen	3,16	3,22	3,28	3,38	3,48	-	-	-	-	-	IMATAP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
1	TKDN industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (rerata tertimbang)	Persen	60,51	61,71	62,95	64,20	65,49	-	-	-	-	-	IMATAP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
1	Pertumbuhan ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	4,03	6,03	7,05	7,92	9,17	-	-	-	-	-	IMATAP
2	Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor	Persen	5,97	6,00	6,03	6,04	6,02	-	-	-	-	-	IMATAP
3	Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	IMATAP
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika								7,34	105,38	105,38	105,38	105,38	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Elektronika dan Telematika dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri elektronika dan telematika	Persen	2,45	3,09	4,41	5,57	6,67	-	-	-	-	-	IET
2	Kontribusi PDB industri elektronika dan telematika terhadap PDB nasional	Persen	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	-	-	-	IET
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika	Ribu Orang	180,37	184,67	189,99	196,28	203,26	-	-	-	-	-	IET
4	Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika	US\$ Miliar	8,07	8,66	9,40	10,35	11,55	-	-	-	-	-	IET
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Elektronika dan Telematika												
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika terhadap total pekerja	Persen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	-	-	IET
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri elektronika dan telematika	Rp Juta / orang/tahun	311,62	312,87	316,62	322,64	331,41	-	-	-	-	-	IET

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika	Rp. Triliun	5,77	7,24	9,27	12,16	16,32	-	-	-	-	-	IET
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Elektronika dan Telematika												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika	Perusahaan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	IET
	2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi	Persen	2,9	2,93	2,96	2,99	3,02	-	-	-	-	-	IET
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika												
	1 TKDN industri elektronika dan telematika (rerata tertimbang)	Persen	32,14	32,78	33,44	34,10	34,79	-	-	-	-	-	IET
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Elektronika dan Telematika												
	1 Pertumbuhan ekspor produk industri elektronika dan telematika	Persen	4,66	7,26	8,57	10,08	11,62	-	-	-	-	-	IET
	2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor	Persen	4,51	4,58	4,67	4,77	4,87	-	-	-	-	-	IET
	3 Rasio impor bahan baku industri elektronika dan telematika terhadap PDB sektor industri elektronika dan telematika	Persen	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	-	IET
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian								7,00	104,77	104,77	104,77	104,77	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	3,91	4,62	6,23	7,55	8,60	-	-	-	-	-	IPAMP
	2 Kontribusi PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB nasional	Persen	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	-	-	-	-	-	IPAMP
	3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian	Ribu Orang	569,91	581,14	595,19	611,70	629,87	-	-	-	-	-	IPAMP
	4 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	US\$ Miliar	4,46	4,91	5,47	6,20	7,11	-	-	-	-	-	IPAMP
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian												
	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total pekerja	Persen	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-	-	-	-	IPAMP
	2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian	Rp Juta / orang/tahun	151,58	155,08	160,40	167,39	176,05	-	-	-	-	-	IPAMP
	3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian	Rp. Triliun	6,60	8,30	10,72	14,19	19,23	-	-	-	-	-	IPAMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi	Persen	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	-	-	-	-	-	IPAMP
SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1	TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata tertimbang)	Persen	42,81	43,66	44,54	45,43	46,34	-	-	-	-	-	IPAMP
SK 4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	3,95	10,04	11,49	13,22	14,73	-	-	-	-	-	IPAMP
	2	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor	Persen	2,49	2,60	2,72	2,85	2,99	-	-	-	-	-	IPAMP
	3	Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	-	-	-	-	-	IPAMP
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam									7,80	108,49	108,49	108,49	108,49	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Logam dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri logam	Persen	5,35	5,91	7,22	8,25	8,95	-	-	-	-	-	IL
	2	Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB nasional	Persen	1,61	1,63	1,67	1,70	1,73	-	-	-	-	-	IL
	3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri logam	Ribu Orang	895,73	914,99	938,94	967,19	998,38	-	-	-	-	-	IL
	4	Nilai ekspor produk industri logam	US\$ Miliar	15,12	15,57	16,17	16,94	17,96	-	-	-	-	-	IL
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam													
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri logam terhadap total pekerja	Persen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	-	-	IL
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri logam	Rp Juta / orang/tahun	244,19	252,46	263,05	275,68	290,15	-	-	-	-	-	IL
	3	Nilai realisasi investasi industri logam	Rp. Triliun	41,96	54,21	71,47	96,32	132,32	-	-	-	-	-	IL
SK 2	Meningkatnya Kemampuan Industri Logam													
	1	TKDN industri logam (rerata tertimbang)	Persen	61,34	62,56	63,82	65,09	66,40	-	-	-	-	-	IL
SK 3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri logam	Persen	3,65	2,95	3,89	4,74	6,04	-	-	-	-	-	IL
	2	Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor	Persen	8,44	8,23	8,04	7,80	7,57	-	-	-	-	-	IL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri logam	Persen	11,36	10,92	10,44	9,92	9,36	-	-	-	-	-	IL
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								37,55	60,40	60,40	60,40	60,40	
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	81	82	83	84	85	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
SK1	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif												
1	Efektifitas Regulasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
SK2	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Profesional dan Berkepribadian												
1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Indeks	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima												
1	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90	90,5	91	91,5	92	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	83	84	85	86	87	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
3	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	3,26	3,265	3,27	3,275	3,28	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	76	77	78	79	80	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	78	78	79	79	80	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
SK4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	96	96	96	96	-	-	-	-	-	Ses ILMATE

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
SK5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika													
	1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	Ses ILMATE
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan								5,43	110,40	190,40	130,40	130,40	
Tj Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional													
	1 Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	2,75	3,13	3,97	4,76	5,17	-	-	-	-	-	IHHP
	2 Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	Persen	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25	-	-	-	-	-	IHHP
	3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Juta Orang	3,30	3,41	3,55	3,72	3,91	-	-	-	-	-	IHHP
	4 Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	US\$ Miliar	15,87	17,49	19,34	21,43	23,75	-	-	-	-	-	IHHP
SK1 Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	Persen	2,56	2,60	2,64	2,69	2,73	-	-	-	-	-	IHHP
	2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Juta Rupiah/ Orang/ Tahun	50,54	51,46	52,77	54,76	57,38	-	-	-	-	-	IHHP
	3 Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	Rp Trilyun	35,35	43,73	55,25	71,21	93,68	-	-	-	-	-	IHHP
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	Persen	1,67	1,68	1,69	1,70	1,71	-	-	-	-	-	IHHP
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Dalam Negeri													
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	54,75	55,85	56,97	58,10	59,27	-	-	-	-	-	IHHP
	2 Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	Diversifikasi Produk	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	IHHP
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	9,61	10,23	10,60	10,79	10,82	-	-	-	-	-	IHHP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Persen	8,82	9,22	9,57	9,85	10,01	-	-	-	-	-	IHHP
	3 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	2,23	2,13	2,02	1,91	1,79	-	-	-	-	-	IHHP
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan								6,89	179,50	105,10	143,70	138,30	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persen	7,22	7,49	8,37	9,44	9,95	-	-	-	-	-	IMHLP
	2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB nasional	Persen	6,42	6,69	7,02	7,34	7,68	-	-	-	-	-	IMHLP
	3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Juta Orang	4,89	5,08	5,31	5,58	5,89	-	-	-	-	-	IMHLP
	4 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan	US\$ Miliar	32,93	35,73	38,93	42,53	46,52	-	-	-	-	-	IMHLP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan												
	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total pekerja	Persen	3,80	3,87	3,95	4,03	4,11	-	-	-	-	-	IMHLP
	2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Juta Rupiah/ Orang/ Tahun	155,2	162,4	168,9	175,3	182,2	-	-	-	-	-	IMHLP
	3 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Rp Trilyun	41,79	55,51	75,23	104,20	147,02	-	-	-	-	-	IMHLP
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Perusahaan	5	6	7	8	10	-	-	-	-	-	IMHLP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Dalam Negeri												
	1 Peningkatan jumlah produk hilir industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Diversifikasi Produk	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	IMHLP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan												
	1 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persen	7,85	8,49	8,95	9,24	9,40	-	-	-	-	-	IMHLP
	2 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total ekspor	Persen	18,31	18,84	19,27	19,54	19,62	-	-	-	-	-	IMHLP
	3 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	3,15	3,18	3,20	3,21	3,20	-	-	-	-	-	IMHLP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar								7,35	83,00	78,40	93,80	94,20		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persen	3,29	3,75	4,62	5,40	5,77	-	-	-	-	-	Mintemgar
	2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	Persen	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	-	-	-	-	-	Mintemgar
	3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Juta Orang	0,83	0,86	0,89	0,92	0,96	-	-	-	-	-	Mintemgar
	4	Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	US\$ Miliar	3,56	3,83	4,15	4,50	4,89	-	-	-	-	-	Mintemgar
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total pekerja	Persen	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67	-	-	-	-	-	Mintemgar
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Juta Rupiah/ Orang/ Tahun	145,67	148,33	152,09	157,85	165,38	-	-	-	-	-	Mintemgar
	3	Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Rp Trilyun	13,59	17,18	22,15	29,14	39,16	-	-	-	-	-	Mintemgar
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Perusahaan	6	7	8	10	11	-	-	-	-	-	Mintemgar
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Dalam Negeri													
	1	Peningkatan jumlah produk hilir industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Diversifikasi Produk	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Mintemgar
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persen	7,07	7,70	8,17	8,50	8,70	-	-	-	-	-	Mintemgar
	2	Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total ekspor	Persen	1,98	2,02	2,05	2,07	2,06	-	-	-	-	-	Mintemgar
	3	Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	-	-	-	-	-	Mintemgar

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro									34,43	77,10	76,10	82,10	87,10	
TJ	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro													
	1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	81	82	83	84	85						Ses Ditjen IA
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro													
	1	Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro	Komoditi	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IA
SK2	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro													
	1	Persentase perusahaan yang melakukan tindaklanjut peningkatan ekspor	Persen	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IA
SK3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	Indeks	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IA
SK4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro													
	1	Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	Persen	71	72	73	74	75	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IA
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki									9,32	141,00	141,00	141,00	141,00	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	4,40	4,88	5,89	6,76	7,31	-	-	-	-	-	ITKAK
	2	Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB nasional	Persen	1,40	1,38	1,37	1,36	1,36	-	-	-	-	-	ITKAK
	3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Juta Orang	4,90	5,03	5,19	5,38	5,60	-	-	-	-	-	ITKAK
	4	Nilai ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki	US\$ Miliar	19,07	20,08	21,36	23,10	25,35	-	-	-	-	-	ITKAK
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki													
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total pekerja	Persen	3,81	3,84	3,86	3,88	3,90	-	-	-	-	-	ITKAK
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Rp Juta / orang/tahun	34,58	35,21	36,02	36,98	38,05	-	-	-	-	-	ITKAK
	3	Nilai realisasi investasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Rp. Triliun	16,84	21,20	27,27	35,82	48,01	-	-	-	-	-	ITKAK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki													
	1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Perusahaan	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	ITKAK
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	62,1	63,4	64,6	65,9	67,2	-	-	-	-	-	ITKAK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	5,56	5,32	6,38	8,12	9,74	-	-	-	-	-	ITKAK
	2	Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor	Persen	10,64	10,62	10,61	10,64	10,68	-	-	-	-	-	ITKAK
	3	Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	4,27	4,20	4,13	4,04	3,94	-	-	-	-	-	ITKAK
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi									7,23	102,47	102,47	102,47	102,47	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia Hilir dan Farmasi dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri kimia hilir dan farmasi	Persen	4,45	4,86	5,68	6,63	7,12	-	-	-	-	-	IKHF
	2	Kontribusi PDB industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB nasional	Persen	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	-	-	IKHF
	3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi	Juta Orang	0,75	0,78	0,81	0,85	0,90	-	-	-	-	-	IKHF
	4	Nilai ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	US\$ Miliar	6,99	7,48	8,14	8,94	9,99	-	-	-	-	-	IKHF
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi terhadap total pekerja	Persen	3,90	3,96	4,04	4,12	4,21	-	-	-	-	-	IKHF
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hilir dan farmasi	Rp Juta / orang/tahun	195,46	196,85	198,59	200,92	203,48	-	-	-	-	-	IKHF
	3	Nilai realisasi investasi industri kimia hilir dan farmasi	Rp. Triliun	16,46	20,88	27,03	35,81	48,41	-	-	-	-	-	IKHF
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi	Perusahaan	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	-	-	-	-	IKHF

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi berteknologi tinggi	Persen	1,48	1,49	1,50	1,51	1,52	-	-	-	-	-	IKHF
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Dalam Negeri												
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)		53	54	55,1	56,2	57,4	-	-	-	-	-	IKHF
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hilir dan Farmasi												
	1 Pertumbuhan ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	Persen	7,71	6,96	8,75	9,95	11,72	-	-	-	-	-	IKHF
	2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi terhadap total ekspor	Persen	3,90	3,96	4,04	4,12	4,21	-	-	-	-	-	IKHF
	3 Rasio impor bahan baku industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	2,07	2,06	2,04	2,02	1,99	-	-	-	-	-	IKHF
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu								7,58	111,00	111,00	111,00	111,00	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia Hulu dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri kimia hulu	Persen	5,33	6,70	7,90	8,46	9,03	-	-	-	-	-	IKHu
	2 Kontribusi PDB industri kimia hulu terhadap PDB nasional	Persen	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	-	-	-	-	-	IKHu
	3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hulu	Juta Orang	0,46	0,48	0,50	0,53	0,56	-	-	-	-	-	IKHu
	4 Nilai ekspor produk industri kimia hulu	US\$ Miliar	7,05	7,33	7,65	7,95	8,28	-	-	-	-	-	IKHu
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hulu												
	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hulu terhadap total pekerja	Persen	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	-	-	-	-	-	IKHu
	2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hulu	Rp Juta / orang/tahun	275,24	280,90	288,08	295,04	302,61	-	-	-	-	-	IKHu
	3 Nilai realisasi investasi industri kimia hulu	Rp. Triliun	31,85	40,72	53,12	70,85	96,34	-	-	-	-	-	IKHu
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor industri kimia hulu	Perusahaan	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	-	-	-	-	-	IKHu
	2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu berteknologi tinggi	Persen	3,45	3,47	3,49	3,51	3,53	-	-	-	-	-	IKHu
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hulu Dalam Negeri												
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	39,90	40,70	41,50	42,40	43,20	-	-	-	-	-	IKHu

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hulu												
1	Pertumbuhan ekspor produk Industri kimia hulu	Persen	10,26	3,87	4,43	3,88	4,20	-	-	-	-	-	IKHu
2	Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu terhadap total ekspor	Persen	3,94	3,87	3,80	3,66	3,49	-	-	-	-	-	IKHu
3	Rasio impor bahan baku Industri Kimia Hulu terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	13,06	12,76	12,42	12,04	11,62	-	-	-	-	-	IKHu
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam								4,82	64,20	64,20	64,20	64,20	
TJ	Meningkatnya peran Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam dalam perekonomian nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	3,87	4,21	4,99	5,90	6,37	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
2	Kontribusi PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB nasional	Persen	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Juta Orang	1,27	1,28	1,31	1,33	1,36	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
4	Nilai ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	US\$ Miliar	1,02	1,08	1,14	1,20	1,28	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total pekerja	Persen	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Rp Juta / orang/tahun	60,65	62,18	63,98	66,25	68,84	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
3	Nilai realisasi investasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Rp. Triliun	19,50	24,05	30,23	38,84	50,87	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 di sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Perusahaan	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	37,9	38,7	39,4	40,2	41,0	-	-	-	-	-	ISKPBGNL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	3,88	5,00	5,83	5,81	6,42	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
	2	Kontribusi ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total ekspor	Persen	0,57	0,57	0,57	0,55	0,54	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
	3	Rasio impor bahan baku industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	-	-	-	-	-	ISKPBGNL
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil									37,34	66,33	66,33	66,33	66,33	
TJ	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
	1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
SK1	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif													
	1	Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
SK2	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	70,00	71,00	73,00	76,00	80,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
	2	Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
	3	Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	3,26	3,27	3,27	3,28	3,28	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
	5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
SK4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
SK5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	Ses Ditjen IKFT
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur								47,10	92,00	108,00	111,00	109,00	
Tj Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
1	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Persen	7,2-7,6	7,5-7,9	7,7-8,0	7,9-8,3	8,2-8,6	-	-	-	-	-	PBKF
2	Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Juta orang	6,2-6,5	6,4-6,7	6,5-6,8	6,7-6,8	6,9-7,2	-	-	-	-	-	PBKF
SK1 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
1	Terlaksananya pembinaan IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur dalam penggunaan e – business (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya	IKM	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-	-	-	PBKF
SK2 Meningkatkan Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Dalam Negeri													
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81	-	-	-	-	-	PBKF
SK3 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
1	Proporsi nilai tambah IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20,00	-	-	-	-	-	PBKF
2	Wirausaha baru industri kecil pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1.400	2.800	4.200	5.600	7.000	-	-	-	-	-	PBKF
3	IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	10	20	40	65	80	-	-	-	-	-	PBKF
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	PBKF
SK4 Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
1	Sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	PBKF

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Jumlah sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang direvitalisasi	Sentra IKM	37	37	39	39	39	-	-	-	-	-	PBKF
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka								48,36	100,00	115,00	119,00	118,00	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka												
1	Pertumbuhan industri aneka	Persen	0,69	0,72	0,95	1,23	1,71	-	-	-	-	-	KSKIA
2	Kontribusi industri aneka terhadap PDB	Persen	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	-	-	-	-	-	KSKIA
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri aneka	Ribu Orang	747,43	782,21	819,58	860,16	903,61	-	-	-	-	-	KSKIA
4	Nilai ekspor produk industri aneka	US\$ Juta	8.801	9.197	9.743	10.431	11.263	-	-	-	-	-	KSKIA
5	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan	Persen	4,7-5,0	5,1-5,5	5,5-5,8	5,9-6,3	6,2-6,6	-	-	-	-	-	KSKIA
6	Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan	Juta orang	3,4-3,5	3,4-3,5	3,5-3,6	3,6-3,7	3,7-3,8	-	-	-	-	-	KSKIA
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Aneka												
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri aneka terhadap total pekerja	Persen	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	-	-	-	-	-	KSKIA
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri aneka	Rp Juta / orang/tahun	20,02	20,39	20,90	21,70	22,76	-	-	-	-	-	KSKIA
3	Nilai investasi sektor industri aneka	Rp. Triliun	1,80	2,10	2,45	2,85	3,31	-	-	-	-	-	KSKIA
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka												
1	Terlaksananya pembinaan IKM kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka dalam penggunaan e – <i>business</i> (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya	IKM	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-	-	-	KSKIA
2	Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi	Persen	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	-	-	-	-	-	ITKAK
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81	-	-	-	-	-	KSKIA
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Aneka												
1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97	-	-	-	-	-	KSKIA
2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29	-	-	-	-	-	KSKIA
3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	-	-	-	-	-	KSKIA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan													
	1	Proporsi nilai tambah IKM kimia, sandang, dan kerajinan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20	-	-	-	-	-	KSKIA
	2	Wirausaha baru industri kecil kimia, sandang, dan kerajinan yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1400	2800	4200	5600	7000	-	-	-	-	-	KSKIA
	3	IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	20	60	90	120	160	-	-	-	-	-	KSKIA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM kimia, sandang, dan kerajinan	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	KSKIA
SK6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka													
	1	Sentra industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	KSKIA
	2	Jumlah sentra IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang direvitalisasi	Sentra IKM	35	35	37	37	37	-	-	-	-	-	KSKIA
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut									46,17	90,00	105,00	109,00	107,00	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut	Persen	3,9-4,3	4,5-4,9	4,8-5,2	5,3-5,7	5,7-6,0	-	-	-	-	-	LMEA
	2	Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut	Juta orang	0,70-0,79	0,75-0,84	0,80-0,89	0,85-0,94	0,94-1,0	-	-	-	-	-	LMEA
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Tumbuhnya <i>startup</i> IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)	-	-	-	-	-	LMEA
	2	Terlaksananya pembinaan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam penggunaan e – <i>business</i> (e- <i>smart</i> IKM) baik melalui <i>workshop</i> , pendampingan, maupun pembinaan lainnya	IKM	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-	-	-	LMEA
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81	-	-	-	-	-	LMEA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat angkut													
	1	Proporsi nilai tambah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20	-	-	-	-	-	LMEA
	2	Wirausaha baru industri kecil logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1200	2400	3600	4800	6000	-	-	-	-	-	LMEA
	3	IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	20	40	60	80	100	-	-	-	-	-	LMEA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	LMEA
SK4	Meningkatnya Persebaran Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Sentra industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	LMEA
	2	Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang direvitalisasi	Sentra IKM	22	24	26	29	32	-	-	-	-	-	LMEA
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka									145,22	273,00	227,00	216,00	221,00	
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka													
	1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil Menengah, dan Aneka													
	1	Terlaksananya IKM dalam penggunaan <i>e-business</i> (e-smart IKM) melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya	IKM	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
	2	Terbentuknya platform pusat bantuan IKM (service center)	Unit	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA (Pusat, BPIPI, Dekonsentrasi IKM)
SK3	Berkembangnya Ekosistem Bisnis yang Kondusif dan Mendukung Pemberdayaan IKM													
	1	Jumlah regulasi/ peraturan	Regulasi	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
	2	Jumlah usulan insentif dan disinsentif bagi IKMA	Dokumen	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Alternatif skema pembiayaan khusus IKM	Skema	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
4	Jumlah IKM yang dilayani di klinik HKI dan kemasan	IKM	200	250	300	300	300	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK4 Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Lembaga Pembiayaan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya serta Penguatan Kelembagaan													
1	Jumlah kerjasama yang dilakukan dan tindak lanjut	Kerjasama	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
2	Penyediaan dan pemberdayaan tenaga penyuluh (TPL, penyuluh)	Penyuluh	240	240	240	240	240	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK5 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Profesional dan Berkepribadian													
1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Indeks	70,00	71,00	73,00	76,00	80,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK6 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
1	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
3	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	3,26	3,27	3,27	3,28	3,28	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
SK7 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	-	-	-	-	-	Set Ditjen IKMA
Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri								5,92	14,00	16,50	18,50	21,50	
SK1 Fasilitas dan Pendampingan Industri													
1	Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri	Rekomen- dasi	9	10	10	11	12	-	-	-	-	-	KIUI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	IDN	12	12	13	14	15	-	-	-	-	-	KIUI
3	Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor	NTB	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	KIUI
4	Kebijakan yang diharmonisasikan	Kebijakan	-	2	3	3	4	-	-	-	-	-	KIUI
Kegiatan Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional								38,04	25,10	29,40	33,90	36,50	
SK1	Pemasaran Global												
1	Kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	Kesepaka- tan	10	2	2	2	2	-	-	-	-	-	ASDIPI
2	Industri yang difasilitasi kemitraan jaringan produksi global	Perusahaan	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	ASDIPI
3	Peningkatan kemampuan ekspor industri	Perusahaan	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	ASDIPI
SK2	Investasi Perusahaan Multinasional												
1	Peningkatan peluang investasi sektor industri	LoI	3	3	4	5	5	-	-	-	-	-	ASDIPI
2	Layanan pendampingan investasi perusahaan multinasional	Investor	2	3	3	4	5	-	-	-	-	-	ASDIPI
SK3	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi												
1	Fasilitasi dan peninjauan kerjasama SDI dengan negara mitra	Negara mitra	2	4	4	5	5	-	-	-	-	-	ASDIPI
2	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	SDI	-	2	3	4	4	-	-	-	-	-	ASDIPI
Kegiatan Pengembangan Akses Industri Internasional								4,69	11,50	14,00	16,00	17,00	
SK1	Ekspansi Produk dan Jasa Industri di Luar Negeri												
1	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Persen	30	35	40	45	50	-	-	-	-	-	All
2	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	Rekomen- dasi	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	All
Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri								6,5	54,0	35,0	35,2	35,5	
SK1	Penyebaran Industri di Luar Jawa												
1	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17	-	-	-	-	-	PI
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33	-	-	-	-	-	PI
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	PI
4	Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar pulau Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	-	-	-	-	-	PI
5	Database Kawasan Industri	Persen	0	30	50	70	80	-	-	-	-	-	PI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan	WPPI	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	PI
7	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	KPI	3	10	10	10	10	-	-	-	-	-	PI
SK2 Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri													
1	Regulasi pengembangan wilayah industri	Kebijakan	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	PI
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri serta pengembangan Akses Industri Internasional								46,82	67,40	87,10	87,40	89,50	
SK1 Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
1	Nilai SAKIP Ditjen KPAIL	Nilai	80	81	82	83	85	-	-	-	-	-	Set Ditjen KPAIL
SK2 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular													
1	Kerjasama selatan-selatan dan triangular	Kerjasama	1	2	3	3	3	-	-	-	-	-	Set Ditjen KPAIL
SK3 Industrial intelligence dan peluang kerja sama industri di luar negeri													
1	Rekomendasi <i>industrial & market intelligent</i>	Rekomen-dasi	6	8	10	10	12	-	-	-	-	-	Set Ditjen KPAIL
SK4 Informasi akses industri global													
1	Helpdesk industri akses global	Modul	-	1	6	8	10	-	-	-	-	-	Set Ditjen KPAIL
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								568	1.298	1.288	1.279	1.270	
Tj Meningkatnya Kontribusi Inovasi dalam rangka Mendukung Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas													
1	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	5	6	7	8	10	-	-	-	-	-	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI
SP1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan (akumulasi)	50	100	160	220	280	-	-	-	-	-	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>														
	1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan		Persen	20	22	25	28	35	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri														
	1	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	-	-	-	-	-	-	PSI
	2	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	-	PIH
SP4	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif														
	1	Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi		Persen	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, PSI, PIH
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan														
	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan		Persen	9	9	9	10	10	-	-	-	-	-	PIH
	2	Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi		Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	PIH
	3	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi		Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	PSI
	4	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri		Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
	5	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi		Persen	50	75	100	100	100	-	-	-	-	-	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI
	6	Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi		Persen	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand
Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri									7,82	155,00	54,12	55,12	54,34		
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri														
	1	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	-	-	-	-	-	-	PSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau								6,11	31,05	33,80	36,45	40,15		
SK1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri													
1	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	PIH	
Kegiatan Penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri								41,61	183,22	167,44	124,51	139,63		
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri													
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81	-	-	-	-	-	Set BPPI	
2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81	-	-	-	-	-	Set BPPI	
SK2	Membangun Sistem Manajemen dan Informasi Terintegrasi													
1	Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)	Persen	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	Set BPPI	
2	Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	21	42	63	83	100	-	-	-	-	-	Set BPPI	
SK3	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi													
1	Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	Persen	56	60	64	72	80	-	-	-	-	-	Set BPPI	
2	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	75	80	83	86	90	-	-	-	-	-	Set BPPI	
3	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	72	80	84	88	92	-	-	-	-	-	Set BPPI	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Agro								4,26	140,03	149,05	149,75	150,15		
SK1	Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
1	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi	Perusahaan (akumulasi)	14	25	40	55	70	-	-	-	-	-	Puslitbang IA	
SK2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
1	Rancangan kebijakan terkait implementasi industri 4.0	Rancangan Kebijakan (akumulasi)	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	Puslitbang IA	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								4,02	248,24	246,39	247,19	246,39		
SK1	Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
1	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (aku- mulasi)	9	25	40	55	70	-	-	-	-	-	Puslitbang IKFTLMATE	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0	Perusahaan (akumulasi)	3	6	9	12	15	-	-	-	-	-	Puslitbang IKFTLMATE
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri								504,42	540,46	637,19	665,98	639,34	
SK1	Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	15	17	20	25	30	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (aku- mulasi)	31	50	80	110	140	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
SK2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	20	22	25	28	35	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								754	985	985	985	985	
SP1	Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang Kompeten												
1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	38.000	36.000	27000	20.000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
2	Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya	Orang	3.200	4.000	5.000	5.900	6.400	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88	-	-	-	-	-	PPKVI
SP2	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri												
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri	Perusahaan	170	180	190	200	210	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Penelitian yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	140	160	200	230	250	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	Orang	125	140	190	220	260	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project	34	44	55	66	77	-	-	-	-	-	Set.BPSPDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP3	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri												
	1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
	2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
	3 Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	290	300	310	320	330	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
	4 Wirausaha industri yang tumbuh	WUB	150	180	200	220	240	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri								42,32	55,71	57,30	59,08	60,71	
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri												
	1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
SK2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri												
	1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
SK3	Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	1 Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Persen	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri								149,45	274,47	265,97	223,99	190,90	
SK1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
	1 Tenaga kerja industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	Orang	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
	2 Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	Orang	36000	38000	36000	27000	20000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
SK2	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri												
	1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
	2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	290	300	310	320	330	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
4	Wirausaha industri yang tumbuh	WUB	150	180	200	220	240	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System								341,12	391,15	384,95	406,21	421,62	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten	Orang	2.500	2.600	2.800	2.900	2.900	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten	Orang	700	800	900	1000	1000	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya	Orang	3200	4000	5000	5900	6400	-	-	-	-	-	PPKVI
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project	9	12	17	22	27	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0	Utilisasi	30%	50%	70%	90%	95%	-	-	-	-	-	Set.BPSDMI
3	ASN dan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri 4.0	Orang	500	600	700	800	500	-	-	-	-	-	Set.BPSDMI
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
1	Ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri di WPPI / KI	Unit	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Unit	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Penelitian yang didesiminasikan	Penelitian	140	160	200	230	250	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Prosentase lulusan program studi keteknikan industri	Persen	97%	97%	97%	98%	99%	-	-	-	-	-	PPKVI
6	Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri	Persen	78	81	85	86	89	-	-	-	-	-	PPKVI
7	Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	Orang	125	140	190	220	260	-	-	-	-	-	PPKVI
8	Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri	Perusahaan	170	180	190	200	210	-	-	-	-	-	PPKVI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju <i>Dual System</i>								207,37	248,28	261,39	280,33	296,38		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
1	Tenaga kerja industri terampil yang kompeten		Orang	2000	2100	2200	2400	2000	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Calon tenaga kerja program <i>dual system</i> yang meningkat kompetensinya		Orang	1000	1200	1500	1800	2100	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional		Orang	1000	1100	1200	1300	1400	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Prosentase lulusan program studi keteknikan industri		Persen	97%	97%	97%	98%	99%	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri		Persen	73	76	80	84	86	-	-	-	-	-	PPKVI
6	Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang Link and Match dengan industri		SMK	965	965	965	965	965	-	-	-	-	-	PPKVI
7	Guru produktif kompeten yang mengikuti pelatihan dan pemagangan		Orang	4160	4160	2080	2080	2080	-	-	-	-	-	PPKVI
8	Insentif Silver Expert		Orang	144	144	144	144	144	-	-	-	-	-	PPKVI
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>													
1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi		Pilot Project	25	32	38	44	50	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN								13,77	15,39	15,39	15,39	15,39		
SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian													
1	ASN yang meningkat kompetensinya		ASN	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri

Tabel 2
Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional						
TJ.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	4,3	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
Definisi/Deskripsi							
Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas. PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Perindustrian mengupayakan peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas setiap tahunnya. Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya.							
Sumber Data							
Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).							
Cara Menghitung (Formula)							
Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1) dikali 100%.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target			
						2020	2021	2022	2023
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional								
Tj.2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	17,5	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9		
Definisi/Deskripsi									
Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri pengolahan nonmigas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB nasional sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan nonmigas terus didorong dapat tumbuh pesat.									
Sumber Data									
Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS.									
Cara Menghitung (Formula)									
Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan Nonmigas dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%.									
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data					
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional						
Tj.3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	18,9	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
Definisi/Deskripsi							
Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi <i>leading sector</i> yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas.							
Sumber Data							
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dari Sakernas.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Juta Orang		Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA				

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional									
Tj.4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	126,6	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6			
Definisi/Deskripsi										
Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan BPS.										
Sumber Data										
Data ekspor produk industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.										
Cara Menghitung (Formula)										
Berdasarkan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas dari BPS.										
Satuan		Klasifikasi			Penanggung Jawab Data					
US\$ Miliar		Maksimasi			Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
S1.1	Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja	14,9	15,0	15,2	15,4	15,5	15,7	
Definisi/Deskripsi								
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas.								
Sumber Data								
Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS.								
Cara Menghitung (Formula)								
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri nonmigas dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%.								
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen		Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					



Kode	Indikator Kinerja					Baseline 2019	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas										
S1.2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas					109,1	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7
Definisi/Deskripsi											
Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.											
Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.											
Sumber Data											
Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin.											
Cara Menghitung (Formula)											
Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas.											
Satuan		Klasifikasi				Penanggung Jawab Data					
Rp. Juta/Orang/Tahun		Maksimasi				Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.3	Produktivitas sektor industri pengolahan	2,02	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15
Definisi/Deskripsi							
Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas merupakan pembagian antara nilai <i>output</i> dengan nilai input antara (<i>intermediate input</i>) di sektor industri besar sedang.							
Nilai <i>output</i> adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri meliputi: barang yang dihasilkan; tenaga listrik yang dijual; jasa industri yang diterima dari pihak lain; selisih nilai stok barang setengah jadi; dan penerimaan lain dari jasa nonindustri. Sedangkan nilai input antara meliputi: biaya bahan baku; bahan bakar, tenaga listrik dan gas; dan sewa gedung, mesin dan alat-alat.							
Sumber Data							
Data Input dan <i>Output</i> Sektor Industri Skala Menengah Besar yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai <i>Output</i> Sektor Industri Skala Menengah Besar dibagi Nilai Input Antara Sektor Industri Skala Menengah Besar. Nilai <i>Output</i> dan Input Antara Industri Skala Menengah Besar mempunyai lag/keterlambatan 2 (dua) tahun. Untuk itu dilakukan prognosa dilakukan sebagai berikut:							
$Output(t) = Output(t-2) \cdot (1 + i(t-1)) \cdot (1 + i(t))$ dimana $Output(t)$ = <i>output</i> pada periode (t) dan $i(t)$ = pertumbuhan indeks produksi IBS pada periode ke (t).							
$Input(t) = Input(t-2) \cdot (1 + d(t-1)) \cdot (1 + d(t))$ dimana $Input(t)$ = input antara pada periode (t) dan $d(t)$ = pertumbuhan deflator pada periode ke (t).							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Nilai		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA			

Kode	Indikator Kinerja					Baseline 2019	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas										
S1.4	Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas					215,9	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1
Definisi/Deskripsi											
Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).											
Sumber Data											
Data investasi yang dipublikasikan oleh BKPM.											
Cara Menghitung (Formula)											
Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan nonmigas.											
Satuan		Klasifikasi				Penanggung Jawab Data					
Rp. Triliun		Maksimasi				Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.5	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	13	15	17	20	25	30
Definisi/Deskripsi							
Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa.							
Sumber Data							
Laporan verifikasi pemanfaatan hasil litbangyasa.							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi Balai Besar/Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa <i>multiyears</i> dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		BPPI			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	63	75	79	82	85	88
Definisi/Deskripsi							
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan di regional ASEAN sejak tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemagangan. Presentase lulusan program studi keteknikan industri ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan program studi keteknikan industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.							
Sumber Data							
Data presentase lulusan program studi keteknikan industri dari BPSDMI.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah siswa didik yang berhasil lulus program studi keteknikan industri dibagi jumlah seluruh siswa didik yang mengikuti ujian kelulusan program studi keteknikan industri dikali 100%.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		BPSDMI			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.7	Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis kompetensi	35.000	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000
Definisi/Deskripsi							
Program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan). Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.							
Sumber Data							
Database Jumlah lulusan diklat dan tenaga kerja yang terserap oleh industri dari BPSDMI							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada tahun berjalan							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Orang		Maksimasi	BPSDMI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0	24	30	36	44	52	60

Definisi/Deskripsi

INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (*management and organization*), orang dan budaya (*people and culture*), produk dan layanan (*product and services*), teknologi (*technology*), dan operasi pabrik (*factory operation*).

Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari :

1. Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0;
2. Level 1 : tahap kesiapan awal;
3. Level 2 : tahap kesiapan sedang;
4. Level 3 : tahap kesiapan matang; dan
5. Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0.

Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut.

Sumber Data

Hasil pengolahan data *Assesment INDI 4.0* dari SIINAS.

Cara Menghitung (Formula)

Dengan melakukan *assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)* pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Perusahaan	Maksimasi	BPPI, Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	12,86	13	13,15	13,30	13,50	13,70

Definisi/Deskripsi

Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangannya (*research and development (R&D)*) tinggi untuk menghasilkan suatu produk*. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Produk-produk industri berteknologi tinggi berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKFT.

*Definisi diambil dari referensi UNIDO, OECD dan WITS.

Sumber Data

Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS.

Cara Menghitung (Formula)

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.3	Tumbuhnya IKM <i>startup</i> berbasis teknologi	NA	20	60	100	160	260
Definisi/Deskripsi							
IKM <i>startup</i> berbasis teknologi yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru berbasis teknologi.							
Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM berbasis teknologi melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, kompetisi bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif.							
Sumber Data							
Data IKM <i>startup</i> berbasis teknologi dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Wirausaha IKM berbasis teknologi.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
IKM		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	205	500	500	500	500	500
Definisi/Deskripsi							
Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten merupakan ASN dan Tenaga Kerja Industri yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Diklat terdiri atas diklat: <i>Awareness Industry 4.0</i> , Infografis, dan Transformasi Industri 4.0.							
Sumber Data							
Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten dari BPSDMI.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah lulusan diklat 4.0 yang kompeten.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Orang		Maksimasi	BPSDMI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
S3.1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	48,1	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
Definisi/Deskripsi							
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Maksimasi	Sekretariat Jenderal				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
S3.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	43,95	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48
Definisi/Deskripsi							
Pemerintah terus berusaha mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa. Sehingga ditargetkan tahun 2024, lebih dari 50% pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Pengukuran persentase capaian komponen dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP.							
Sumber Data							
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).							
Cara Menghitung (Formula)							
Hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
S3.3	Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	6.097	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400
Definisi/Deskripsi							
Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku merupakan jumlah produk industri yang diberikan sertifikat TKDN pada tahun tersebut dan bukan merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi sampai dengan tahun berjalan. Jumlah produk industri yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai capaian $\geq$ 25% yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dijelaskan pada pasal 64 ayat 1, produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga.							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung (Formula)							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Produk		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
S3.4	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	3	5	7	10	15	20
Definisi/Deskripsi							
Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan SNI wajib diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut. Persentase jumlah SNI yang dimaksud adalah persentase jumlah SNI yang diterapkan dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan.							
Sumber Data							
Hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri.							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah akumulatif SNI baik wajib maupun sukarela yang dapat diterapkan, lalu hasilnya dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. <i>Baseline</i> total SNI aktif tahun 2019 adalah 4600 SNI, sehingga baseline SNI yang diterapkan adalah 138 SNI atau 3%. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		BPPI			

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri									
S4.1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas				(2,7)	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1
Definisi/Deskripsi										
Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, salah satunya diukur melalui pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas.										
Sumber Data										
Data ekspor industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.										
Cara Menghitung (Formula)										
Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas = (Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t) – Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1))/Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1) dikali 100%.										
Satuan		Klasifikasi			Penanggung Jawab Data					
Persen		Maksimasi			Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	75,6	74,3	74,9	75,5	76,0	76,5

Definisi/Deskripsi

Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri.

Sumber Data

Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS.

Cara Menghitung (Formula)

Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	37,98	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80

Definisi/Deskripsi

Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai tambah.

Sumber Data

Data impor bahan baku sektor industri dan PDB sektor industri nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.

Cara Menghitung (Formula)

Nilai impor Bahan Baku Sektor Industri dibagi PDB Harga Berlaku Sektor Industri Nonmigas dikali 100%.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Minimasi	Ditjen IA, IKFT, ILMATE, IKMA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	26,8	27	28	29	30	32

Definisi/Deskripsi

Salah satu upaya meningkatkan ekspor produk industri manufaktur yaitu dengan memperbanyak jenis produk yang diekspor (diversifikasi). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tarif preferensi guna mengekspor produk ke negara mitra FTA/PTA/EPA. Semakin bertambahnya jenis produk yang di ekspor menggunakan tarif preferensi mengindikasikan semakin banyak produk industri nasional yang diterima oleh negara-negara lain, baik sebagai bahan baku, komponen, maupun produk akhir.

Sumber Data

Data jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor menggunakan tarif preferensi dari Kementerian Perdagangan.

Cara Menghitung (Formula)

Jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor menggunakan tarif preferensi dibagi total jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor (ke negara mitra FTA/PTA/EPA) kali 100%.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Ditjen KPail



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	18,50	18,60	18,80	19,20	19,60	20
Definisi/Deskripsi							
Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas.							
Sumber Data							
Data Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas oleh BPS diolah Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	7.986	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
Definisi/Deskripsi							
Wirausaha industri kecil yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha.							
Sumber Data							
Data wirausaha industri kecil dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Wira Usaha Baru (WUB)		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	NA	50	120	190	265	340
Definisi/Deskripsi							
Penguatan Kewirausahaan dan IKM dapat diindikasikan dengan banyaknya IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya. Kriteria perhitungan IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang melakukan peninjauan kerjasama, perjanjian, dan kontrak.							
Sumber Data							
Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
IKM		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	2,2	2,40	2,75	3,35	4,05	5
Definisi/Deskripsi							
Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM adalah nilai pinjaman kepada IKM dibandingkan dengan total nilai penyaluran pinjaman.							
Sumber Data							
Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM dari Bank Indonesia (BI).							
Cara Menghitung (Formula)							
Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM berdasarkan data BI.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.1	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	8	11	13	15	16	17
Definisi/Deskripsi							
KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi merupakan KI yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) efektif. KI yang beroperasi di luar Jawa dimungkinkan sama dari tahun ke tahun dan sudah memiliki <i>anchor industry</i> . Jumlah KI yang beroperasi merupakan kumulatif, sehingga menunjukkan jumlah KI yang telah difasilitasi perizinannya. Pada RPJMN tahun 2020-2024, ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) KI prioritas di luar Jawa telah memiliki IUKI efektif, meliputi: Teluk Weda, Galang Batang, Ketapang, Bintan <i>Aerospace</i> , Takalar, Tanggamus, Ladong, Tanjung Enim, dan Sadai.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang telah memiliki IUKI efektif.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
KI		Maksimasi		Ditjen KPAIL			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.2	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	15	18	22	26	30	33
Definisi/Deskripsi							
KI yang dikembangkan merupakan kawasan-kawasan yang difasilitasi. Pemenuhan terhadap infrastruktur dasar dan penunjangnya merupakan prasyarat bagi pengembangan KI ke depannya. Dalam periode 2020 – 2024, target pengembangan KI baru berjumlah 18 KI, meliputi: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tenayan, Tanjung Buton, Kemingking, Way Pisang, Katibung, Pesawaran, Batanjung, Surya Borneo, Jorong, Batu Licin, Tanah Kuning, Brebes, Palu, Bangkalan, Sumbawa Barat, dan Teluk Bintuni.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang difasilitasi pemenuhan infrastrukturnya.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
KI		Maksimasi		Ditjen KPAIL			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.3	Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi	N/A	2	2	3	3	3
Definisi/Deskripsi							
KI dengan zona tematik merupakan KI yang telah ada/beroperasi (<i>existing</i>) yang menyediakan layanan berdasarkan fungsi-fungsi spesifik. Dengan adanya tambahan fungsi spesifik tersebut, KI dengan zona tematik memiliki kekhususan yang tidak dimiliki KI lain. Pengembangan KI dengan zona tematik disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam hal: pemenuhan standar tertentu (misal: halal), manajemen pengelolaan (misal: limbah), teknologi, dan lain-lain.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang memenuhi unsur tematik.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
KI	Maksimasi	Ditjen KPAIL					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	29,55	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
Definisi/Deskripsi							
Peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa menunjukkan adanya penyebaran pembangunan industri di luar Jawa. Hal-hal yang memicu semakin meningkatnya kontribusi nilai tambah di luar Jawa perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi (gas dan listrik) dan peningkatan SDM/tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur mulai bertumbuh di luar Jawa. Pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa memberikan dampak positif bagi peningkatan kontribusi sektor industri. Dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Prioritas diharapkan ke depannya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional meningkat.							
Sumber Data							
Data nilai tambah regional dari BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa dibandingkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas secara nasional.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen KPAIL					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.5	Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	14	17	23	29	38	44

Definisi/Deskripsi

Sentra IKM di luar Jawa yang dibangun dan beroperasi, merupakan jumlah sentra IKM yang difasilitasi dan/atau dibangun di luar Jawa dan sampai dengan beroperasi.

Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana disebutkan bahwa pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang diarahkan untuk mendukung industri besar dan pengembangan WPPI atau sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sentra IKM.

Sumber Data

Database Ditjen IKMA.

Cara Menghitung (Formula)

Data sentra IKM di luar Jawa yang beroperasi dari Ditjen IKMA.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Sentra IKM	Maksimasi	Ditjen IKMA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif						
S7.1	Efektifitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	NA	72	74	76	78	80

Definisi/Deskripsi

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif diukur melalui indikator kinerja yaitu efektifitas regulasi industri.

Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak independen dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian secara lebih spesifik, sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi yang disusun berdampak terhadap industri.

Sumber Data

Biro Hukum.

Cara Menghitung (Formula)

Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian. Pengukuran efektifitas regulasi industri dilakukan dengan menggunakan metode.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			
S8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan									
S8.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	28	33	37	46	61	71			

Definisi/Deskripsi

Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi SIH berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH.

Jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH dibandingkan dengan jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 8 SIH di 2019 terdapat 210 perusahaan).

Sumber Data

Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga SIH.

Cara Menghitung (Formula)

Menghitung jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH. Jumlah tersebut lalu dibagi target perusahaan sesuai lingkup SIH di tahun berjalan. Asumsi terdapat penambahan 5 SIH (100 perusahaan) pertahun. Perhitungan target (2020 → 28/310, 2021 → 37/410, 2022 → 46/510, 2023 → 61/610, 2024 → 71/710).

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Perusahaan	Maksimal	BPPI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
S8.2	Infrastruktur kompetensi industri	13	20	20	20	20	20

Definisi/Deskripsi

Infrastruktur kompetensi industri merupakan penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk di bidang industri pada tahun berjalan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat kompetensi. Sedangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi.

Sumber Data

Data infrastruktur kompetensi industri dari BPSDMI.

Cara Menghitung (Formula)

Jumlah SKKNI yang tersusun dan disahkan oleh BNSP.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
SKKNI	Maksimal	BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
S9.1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,089	1,5	1,4	1,3	1,20	1,00
Definisi/Deskripsi							
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Perindustrian.							
Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi <i>minimize</i> (semakin kecil lebih baik).							
Sumber Data							
Data hasil pemeriksaan BPK.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Temuan eksternal yang bersifat keuangan dibanding dengan total anggaran Kementerian Perindustrian.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Minimasi	Inspektorat Jenderal				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
S9.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	90	91	91,5	92	92,5	93
Definisi/Deskripsi							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
Sumber Data							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, <i>database</i> Itjen							
Cara Menghitung (Formula)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
S9.3	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	NA	3	3	3	4	4	
Definisi/Deskripsi								
Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.								
Sumber Data								
- Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP.								
Cara Menghitung (Formula)								
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.								
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Level		Maksimasi	Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
S10.1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	NA	70	71	73	76	80
Definisi/Deskripsi							
Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian adalah tingkat kompetensi SDM Kementerian Perindustrian yang diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Pengukuran dilakukan melalui agregat dari beberapa variabel antara lain presentase pemenuhan standar kompetensi yang diukur dengan asesmen; presentase nilai kinerja pegawai minimal baik; presentase tingkat kehadiran pegawai; persentase tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN; serta variabel-variabel lain sesuai dengan kebutuhan (penetapan variabel yang digunakan untuk penghitungan indikator kinerja dapat berubah yaitu bisa bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi).							
Sumber Data							
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia							
Cara Menghitung (Formula)							
No	Kegiatan	Pengukuran	Contoh Cara Pengukuran	Hasil	Hasil Total	Target	Capaian
1	Penilaian Kinerja Individu	Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik 70% / jumlah pegawai	4000 pegawai / 5000 pegawai =	80%	77%	70%	110,48%
2	Disiplin	Tingkat kehadiran pegawai dari sistem absensi per tahun	Kemenperin rata-rata =	84%			
3	Disiplin	Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN/LH-KPN / jumlah pegawai	4500 pegawai / 5000 pegawai	90%			
4	Variabel-variabel lain sesuai kebutuhan	Menyesuaikan	Menyesuaikan				
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Nilai		Maksimasi	Sekretariat Jenderal				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
S10.2	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkat kompetensinya	767	500	550	600	650	700
Definisi/Deskripsi							
Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis.							
Sumber Data							
Data ASN yang meningkat kompetensinya dari BPSDMI.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah ASN yang lulus Diklat Fungsional/Teknis Industri dan mengikuti Program Rintisan Gelar.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Orang	Maksimasi	BPSDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
S11.1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	NA	3	3,1	3,12	3,15	3,18
Definisi/Deskripsi							
Indikator Kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kesesuaian data dan informasi industri yang dimiliki Pusdatin terhadap permintaan data dan informasi dari pimpinan di lingkungan Gedung Pusat Kementerian Perindustrian. Kuesioner berisi pertanyaan tentang tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemudahan akses pimpinan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Arti nilai skala likert: Indeks 0,0 - 1,0 : Sangat Tidak Setuju; Indeks 1,1 - 2,0 : Tidak Setuju; Indeks 2,1 - 3,0 : Setuju; dan Indeks 3,1 - 4,0 : Sangat Setuju.							
Sumber Data							
Hasil kuisioner dari Pusdatin Kemenperin.							
Cara Menghitung (Formula)							
Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Pimpinan (Eselon III) di Gedung Pusat Kementerian Perindustrian pada bulan Januari dan Juli.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Skala (1-4)		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
S11.2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	NA	100	100	100	100	100

Definisi/Deskripsi

Ketepatan waktu dalam mengunggah 26 informasi (secara kumulatif sampai dengan tahun 2024) sesuai amanat PP Nomor 2/2017 sebagai informasi baku ke dalam website kemenperin.go.id. Pengunggahan dilakukan secara periodik: (i) bulanan: ekspor-impor (10 hari setelah rilis BPS); (ii) triwulanan: perkembangan investasi industri (10 hari setelah rilis BKPM); dan (iii) tahunan 24 informasi lainnya (paling lambat 31 Desember tahun berjalan) dengan rincian jumlah informasi yang harus diunggah pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020: 23 informasi (informasi industri dan kawasan industri; informasi ekspor dan impor; informasi agenda pameran nasional dan internasional; informasi hak kekayaan intelektual; informasi investasi; informasi potensi sumber daya wilayah; informasi sumber daya manusia industri; informasi standarisasi industri; informasi infrastruktur industri; informasi kebijakan industri; informasi hasil riset terapan; informasi keunggulan sumber daya daerah; informasi sumber daya alam; informasi kebijakan perdagangan; informasi tentang permintaan informasi dagang; informasi rancang bangun dan perekayasa industri; informasi jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi; informasi rencana tata ruang wilayah; informasi penyediaan sumber pembiayaan; informasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; informasi hasil audit teknologi; informasi sumber daya manusia industri; informasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri).
- Tahun 2021: 26 informasi (23 informasi di tahun 2020 ditambah informasi konsumsi produk industri, informasi usaha bersama pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerja sama teknologi, informasi peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai).
- Tahun 2022: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.
- Tahun 2023: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.
- Tahun 2024: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.

Sumber Data

Website Kemenperin

Cara Menghitung (Formula)

$$\text{Persentase ketepatan waktu} = \frac{\text{Total informasi baku yang diunggah tepat waktu pada tahun tersebut}}{\text{Total informasi baku yang harus diunggah pada tahun tersebut}} \times 100\%$$

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimal	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
S12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima							
S12.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Definisi/Deskripsi

Merupakan tingkat kualitas laporan keuangan dan BMN yang dipublikasikan oleh BPK. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Sumber Data

Hasil audit dari Kementerian Keuangan.

Cara Menghitung (Formula)

Nilai WTP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPK.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Predikat	Maksimal	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
S12.2	Indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	76,91	78	78,5	79	79,5	80

Definisi/Deskripsi

Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan *Grand Design* pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: area manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, dan penguatan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian reformasi birokrasi K/L merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilaksanakan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun.

Sumber Data

Data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

Cara Menghitung (Formula)

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan menilai 8 area perubahan yang dilakukan oleh tim dari KemenPANRB. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*).

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Nilai	Maksimasi	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
S13.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,7	95,5	96	96,5	97	97,5

Definisi/Deskripsi

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen *trilateral meeting*.

Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Sumber Data

Dokumen *Trilateral Meeting* antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung (Formula)

Perbandingan *Trilateral Meeting* antara Kementerian Perindustrian dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
S13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	77,12	78	78.5	79	79.5	80
Definisi/Deskripsi							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.							
Sumber Data							
Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB.							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Nilai		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			



halaman ini sengaja dikosongkan

